

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

PEMATANGSIANTAR



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tabel T.C 29 dan Tabel T.C.30	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar	27
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar	29
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel T.C.31	38
2.5	Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Memuat Penjelasan Usulan Pemangku Kepentingan dalam Merumuskan Program/Kegiatan.....	51
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN.....	55
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar	37
3.3	Program dan Kegiatan Tabel T.C.33.....	63
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	81
BAB V	PENUTUP.....	85
5.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	85
5.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	85
5.3	Rencana Tindak Lanjut	86

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024, akan dijadikan sebagai Pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan Sarana Peningkatan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) nantinya.

Pematang Siantar,

2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR**



**Ir. ALI AKBAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196709231993031004**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024, merupakan bentuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- Undang ini secara Substansi Mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk Periode Tahunan dan juga sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar merupakan Rencana Kerja Tahunan, Penjabaran dari Pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022 -2027. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Kepmendagri No. 050-589 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi Pemutakhiran, klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada Level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan kini harus menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.

Dalam Perencanaan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan,

melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik, agar perencanaan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar agar tercapai Visi dan misi Wali Kota Terpilih yaitu : “ **Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.**”

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022 -2027 dengan Memperhatikan Pogram Prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023 dan juga Memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan Daerah agar di dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan terwujud Sinergitas dengan Dokumen Perencanaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2027;2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi Tolak Ukur Penilaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024:

1. Sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam Mengoperasionalkan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya dalam Rangka Mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun Rencana 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini Menguraikan tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Melampirkan Penjelasan tentang Sumber Dana yang dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan Kegiatan yang berasal serta nominal jumlah Dana Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisikan Uraian Penutup tentang Catatan Penting yang perlu mendapat Perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Tercapai tidaknya Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang Pencapaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam Pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari Program Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur Kinerja itu sendiri diperlukan Indikator Kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan Laporan Keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan Indikator Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Secara rinci Indikator-Indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (Input) yaitu Indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
2. Indikator Keluaran (Output) yaitu Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
3. Indikator Hasil (Outcome) yaitu Indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau Indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disusun sebelumnya, sedangkan Kinerja Keuangan adalah Perhitungan Realisasi Penyerapan Dana sesuai dengan Sasaran Penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar pada **tahun 2022** melaksanakan sebanyak 6 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.307.974.574,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.717.434.588 dengan realisasi Keuangan 88,87% , sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah . Pada

Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.

33.589.244 realisasi sebesar Rp. 22.801.666 ,- (67,88 %). Capaian output untuk

Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 4 laporan. Pencapaian target penggunaan dana sebesar 67,88 %

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 8.536.077,- realisasi sebesar Rp.

5.179.077,- (60.67 %)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 2 laporan.

Pencapaian target penggunaan dana sebesar 60,67 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.2.830.312.128,-realisasi sebesar

Rp. 2.391.326.517,-(84,49%). Capaian Output untuk Indikator ini adalah

sebanyak 14 bulan. Realisasi kegiatan ini pada

tahun 2022 merupakan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pencapaian target kinerja mencapai 100 %, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 84,49 %.

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.54.384.439,-,- realisasi sebesarRp. 47.723.707,- (87,75 %)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini pada Tahun 2022 merupakan belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 87,75 %.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 28.648.945,-realisasi sebesar Rp. 25.071.710,-. (87,51%)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan belanja alat alat keperluan rumah tangga Kantor.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar (87,51%)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 24.720.000,-realisasi sebesar Rp. . 24.510.142,- (99,15%) Capaian output untuk Indikator ini pada 2022 adalah sebanyak 12 bulan. Realisasi kegiatan ini pada merupakan belanja makan dan minum tamu dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, dan pencapaian target

penggunaan dana 99,15%.

d. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 47.904.790,- realisasi sebesar Rp. 39.249.834,- (81,93%)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan Belanja cetak dan penggandaan.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar (81,93%).

e. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 209.731.000,- realisasi sebesar Rp.182.589.440,- (87,06).Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 87,06 %

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. *Pengadaan Mebel*

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 133.457.700,-realisasi sebesar Rp. 133.027.900,- (99,68%)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 53 unit. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Pencapaian target kinerja mencapai 100 %, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 99,68 %.

b. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan. Pada Tahun 1011 dialokasikan dana sebesar Rp. 319.000,- realisasi sebesar Rp. 319.000,- (100%)

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 1011 adalah sebanyak 1 unit. Realisasi kegiatan ini merupakan pengadaan perlengkapan gedung Kantor.

Pencapaian target kinerja mencapai 100 %, dan pencapaian target penggunaan dana 100 %.

c. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.815.952,- realisasi sebesar Rp. 1.815.952,- (100%) 2022 adalah sebanyak 32 unit. Realisasi kegiatan ini merupakan tersedianya pendukung gedung kantor. Pencapaian target kinerja mencapai 100%, dan pencapaian target penggunaan dana sebesar 100%`

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.*

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 47.337.936.-realisasi sebesar Rp. 39.094.971 (82,59%) 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan belanja jasa air, jasa listrik dan jasa internet kantor. Pencapaian target penggunaan dana 82,59 %.

b. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor*

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 167.831.000,- realisasi sebesar Rp. 165.093.000,- (98,37 %). Capaian output untuk Indikator ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 bulan. Realisasi kegiatan ini pada Tahun 2022

merupakan terbayarnya jasa pelayanan PNS dan Non PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana 98,37 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 47.320.000,-realisasi sebesar Rp. 46.062.570,- (97,34%).

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 bulan. Realisasi kegiatan ini merupakan tersedianya jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 97,34 %.

b . Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang berada dalam pemeliharaan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 22.700.000,-realisasi sebesar Rp. 22.700.000,- Pencapaian target penggunaan dana sebesar 100 %.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp28.650.000.00,- realisasi sebesar Rp. 28.449.600,- (99,30%)

Capaian output untuk Indikator ini pada 2022 adalah sebanyak 3 bulan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2022 merupakan ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, dan pencapaian target penggunaan dana 99,30 %

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- a. *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.56.882.061,-realisasi sebesar Rp. 53.662.100,- (94,34 %).

Capaian Output untuk Indikator ini adalah sebanyak 4 kegiatan, Realisasi kegiatan ini pada Tahun 2022 merupakan Rangkaian Kegiatan Upacara hari Besar Nasional di Kota Pematang Siantar.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana sebesar 94,34 %.

- b. *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 361.151.231,- realisasi sebesarRp. 332.783.902 ,- . (92.15%)

Capaian output untuk Indikator ini pada tahun 2022 adalah 6 kegiatan.

Pencapaian target penggunaan dana 92.15%

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- *Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 871.555.199,- realisasi sebesar Rp. 869.309.804,- (99,74 %).

Capaian output untuk Indikator ini pada Tahun 2022 adalah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan dan Bantuan Dana Hibah Partai Politik.

Pencapaian target kinerja mencapai 100%, sedangkan pencapaian target penggunaan dana 99,74 %).

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya

- *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.*

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 85.991.379,-realisasi sebesar Rp.84.355.230,-. Capaian output untuk Indikator ini pada 2022 adalah 4 kegiatan.

Pencapaian target penggunaan dana masih (98,10 %.)

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.*

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp.88.226.870,- realisasi sebesar Rp. 62.368.400,- Capaian output untuk Indikator ini pada 2022 adalah 1 kegiatan

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- a. *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.*

Indikator Kinerja : Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capaian output untuk Indikator ini pada tahun 2022 adalah 3 kegiatan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 18.704.113,-realisasi sebesar Rp. 12.848.000,- (68,69 %). Pencapaian target penggunaan dana (68,69 %).

- b. *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga*

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Capaian output untuk Indikator ini pada tahun 2022 adalah 4 kegiatan.

Pada Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 138.205.510,-realisasi sebesarRp. 127.092.065- (91,96%). Pencapaian target penggunaan dana 91,96%

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

- Tidak Ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2022.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 67,88 %
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 60,67 %
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : 84,49 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. : 87,75 %
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 87,51%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor : 99,15%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 81,93%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 87,06 %
- Pengadaan Mebel : 99,68 %
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : 100%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 82,59%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor. : 98,37%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 97,34%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : 99,30%

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : 94,34 %
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : 92.15%

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah : 99,74%

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah : 98,10 %

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial .

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : 68,69 %.

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : 91,96%.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Tidak ada Kegiatan yang Melebihi Realisasi Target Kinerja Tahun 2022.

2.1.4 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target Kinerja Program/ kegiatan terhadap target capaian Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar adalah bahwa dalam Perencanaan Target berikutnya harus melihat Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.5 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

Dalam upaya Pencapaian Sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Dalam Perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga Penyerapan Anggaran dapat tercapai
2. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Review hasil Evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pematangsiantar

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	6 bln	12 bln	9 bln	75%	2 dok	15 bln, 2 dokumen	100
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4 dok	6 bln	12 bln	9 bln	75%	4 dok	15 bln, 2 dokumen	50
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.									
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	23 orang/14 bln	14 bln	14 bln	12 bln	86%	14 bln	40 bln	286
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 bln	12 bln	9 bln	75%	12 bln	30 bln	3000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	1 Paket	9 bln	12 bln	9 bln	75%	12 bln	30 bln	3000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	30 bln	3000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9 bln	12 bln	9 bln	75%	12 bln	30 bln	3000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 lap	9 bln	12 bln	9 bln	75%	12 bln	30 bln	208
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9 unit	3 unit	53 unit	1767%	1 unit	63 unit	6300
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	3 unit	4 unit	2 unit	50%	4 unit	9 unit	225
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	26 unit	4 unit	43 unit	1075%	-	69 unit	230
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.									
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kegiatan Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	-
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 bln	12 bln	9 bln	75%	12 bln	33 bln	275

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	12 lap	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 bln	12 bln	9 bln	75%	6 unit	15 bln, 6 unit	100
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	3 bln	0 bln	3 bln	-	33 unit	6 bln, 33 unit	3300
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33 Unit	3 bln	-	3 bln	-	-	6 bln	18,2
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.									
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	6 kegiatan	6 kegiatan	4 kegiatan	67 %	200 Orang	10 kegiatan, 200 orang	100
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	1 00 oarng	2 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan	600%	100 Orang	7 kegiatan, 100 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sejarah Kebangsaan.								
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.									
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	90.000 orang	8 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	-	11 kegiatan	12,2
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pematang Siantar sesuai ketentuan dan diselesaikan tepat waktu tepat waktu dengan melakukan koordinasi dengan Partai Politik di Kota Pematang Siantar.	-	-	-	-	-	8 Partai	8 partai	-
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meidiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	100 orang	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100 Orang	1 kegiatan, 100 orang	100
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA.									
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya.									
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	500 orang	2 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	400%	500 orang	6 kegiatan, 500 orang	100
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	35 orang	4 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	35 orang	7 kegiatan, 35 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.								
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	25 orang	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	200%	25 orang	6 kegiatan, 25 orang	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar berdasarkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai Tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa. Untuk Melaksanakan dan Menyelenggarakan Tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar mempunyai Fungsi sebagai berikut:

Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan terhadap Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;

- a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan Hubungan Kerjasama antar Lembaga dalam rangka Membina dan Memelihara Stabilitas Politik di Daerah;
- c. Perumusan Kebijakan dalam Pelaksanaan, Penyelamatan dan Rehabilitasi terhadap berbagai Ancaman atau Bencana;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan / Peralatan;

Tabel T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Rasio masyarakat yang mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	-	-	300 Orang/7,5 %	700 Orang/17,5 %	750 Orang/18,75%	800 Orang/20 %	93,34 %	200 Orang	750 Orang/ 18,75 %	800 Orang/20 %	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar adalah Salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota Pematang Siantar dalam Melaksanakan Tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kota Pematang Siantar.

Stabilitas Politik dan Keamanan di Kota Pematang Siantar cenderung baik dan Dinamis. Hal ini berdampak pada Penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga Masyarakat, serta Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, keagamaan, ketertiban Daerah, memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis Pengamanan Daerah, pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ipoleksosbud, Peningkatan Penegakan dan Kepastian Hukum serta meningkatkan rasa Nasionalisme Kebangsaan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar yang berkaitan dengan Pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat di Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
- b. Rendahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat.
- c. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, dan Bela Negara di masyarakat.
- d. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan dan Parpol perlu ditingkatkan dalam penyebarluasan nilai-nilai Ideologi Pancasila
- e. Minimnya Kegiatan Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

- f. Belum Maksimalnya Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- g. Belum Maksimalnya Fasilitasi dan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- h. Belum tersedianya fasilitasi dalam Pembinaan Duta Pancasila
- i. Belum tersedianya fasilitasi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

2. Bidang Politik Dalam Negeri

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih (golput) dalam setiap kegiatan Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif, pemilu Presiden, maupun Pemilukada
- c. Tingginya Praktek Politik Uang (*money politics*) setiap Pelaksanaan Kegiatan Pemilu
- d. Rendahnya Pemahaman tentang Etika dan Budaya Politik Demokratis di Masyarakat;
- e. Masih adanya isu SARA yang muncul dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
- f. Belum optimalnya Peran Partai Politik dalam proses Peningkatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

3. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
- b. Kurangnya Tingkat Kewaspadaan Dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya potensi konflik sosial
- c. Masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau Demonstrasi oleh Organisasi atau Kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
- d. Belum maksimalnya kegiatan monitoring antisipasi cegah dini potensi konflik dan Mediator Penanganan Konflik;
- e. Belum tersedianya fasilitasi Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
- f. Belum maksimalnya Pemantauan terhadap aktivitas Orang Asing / Tenaga Kerja Asing/NGO;
- g. Belum terlaksananya Rencana Aksi Daerah tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan yang bisa berpengaruh terhadap munculnya Kesenjangan Sosial, yang memicu Konflik Sosial Ekonomi di Masyarakat;
3. Ketidaksiapan Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Krisis Global yang berimbas pada berkurangnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat, yang bisa Menimbulkan Kerawanan Sosial dan Konflik di Masyarakat;
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Demokratisi, Penegakan Hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya Konflik dan Disintegrasi Sosial;
4. Terjadinya Dekadensi Moral di Masyarakat yang ditandai dengan banyaknyapenyakitmasyarakat,sepertikriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan miras;
5. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alamdi masyarakat sebagai dampak meningkatnya Kegiatan Penggalian, Pertambangan dan Industri.

5. Bidang Kesekretariatan SKPD (Manajemen dan Ketatalaksanaan Organisasi, Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur serta Sarana dan Prasana)

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
- b. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dengan banyak tuntutan untuk Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel merupakan amanah Reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya Kinerja Sumber Daya Aparatur;
- c. System kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum;
- d. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, antara lain Jabatan Struktur Organisasi belum terisi sepenuhnya, Kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur masih terbatas sehingga Tupoksi yang belum terlaksana secara maksimal, manajemen SDM Aparatur belum mengarah pada Peningkatan Kinerja Pegawai, Indikator

Kinerja utama Kelembagaan dan Prosedur kerja yang dapat mendukung Peningkatan Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Pematangsiantar

- e. Masih kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja;
- f. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
- g. Belum tertibnya Penyajian Data dan Informasi serta Penataan Arsip/ Dokumentasi;
- h. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

2.3.1 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional

Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri terdapat 1 (satu) Program Strategis yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang secara khususnya menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Dengan Sasaran Program yaitu Meningkatkan Ketahanan dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi dan Sosial Budaya; terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dalam Negeri serta Mengembangkan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

- a. Penurunan jumlah Peristiwa gangguan Keamanan dalam Negeri berlatar belakang Ideologi Radikal, isu Separatisme, Daya Ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- c. Prosentase Partisipasi Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politoik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya

- Penyusunan Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis terhadap Lingkungan Internal dan Eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan Internal Organisasi merupakan faktor Lingkungan yang berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor Lingkungan yang berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi dan cenderung di luar kendali.

A. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam Menentukan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factors) bagi Suatu Organisasi dengan mengetahui Kondisi Eksternal Organisasi akan dapat diketahui Peluang dan ancaman

yang mempengaruhi Organisasi.

1. Analisis Peluang (Opportunities)

Peluang adalah Situasi dan Faktor-faktor Luar Organisasi yang bersifat Positif, yang membantu Organisasi mencapai atau mampu melampaui Pencapaian Visi dan Misi.

Berdasarkan Analisa Eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta Teknologi Informasi yang memberikan kemudahan Alternatif Sistem dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Adanya Peningkatan Aktivitas Perekonomian masyarakat Kota Pematang Siantar yang berdampak pada Peningkatan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematang Siantar.
- c. Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara Nasional di seluruh Lembaga dan Kementerian termasuk pada Pemerintah Daerah untuk menciptakan Good Government.
- d. Kedudukan Kota Pematang Siantar sebagai Kota Transit bagi Kota-kota sekitarnya memberikan Peluang dalam Pengembangan usaha di Bidang Jasa Transportasi, Perdagangan, Pendidikan dan Industri serta Jasa lainnya

2. Analisa Ancaman (Threat)

Ancaman adalah Faktor-faktor luar Organisasi yang bersifat Negatif, yang dapat Mengakibatkan Organisasi gagal dalam mencapai Visi dan Misi.

Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan Pribadi atau Kelompok telah merubah Tatanan masyarakat yang menjunjung Nilai Harmoni dan Persaudaraan serta Persahabatan menjadi Masyarakat yang Radikal Progresif, dapat Mengancam Pertumbuhan Iklim Investasi Kota yang Kondusif.
- b. Krisis Keuangan Global yang disebabkan oleh Krisis Perekonomian Dunia

Membuka Peluang terjadinya Inflasi Tinggi, Penurunan Nilai Mata Uang dalam Negeri dan Mempengaruhi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menyebabkan Penurunan Intensitas Perdagangan dan Lemahnya Sektor Usaha Jasa yang saat ini banyak menopang Sendi-sendi Perekonomian di Kota Pematang Siantar sebagai Kota Jasa.

- c. Populasi tidak terkendali sebagai Dampak Tingginya Laju Migrasi yang dapat Memicu Timbulnya Permasalahan Sosial di Kota Pematang Siantar.
- d. Sektor Perbankan belum mampu Menjamin Alokasi Dana yang memadai untuk mendanai Proposal-proposal Investasi yang diajukan, terutama oleh Sektor Riil dan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan Sektor Perbankan saat ini belum Menyentuh Langsung Industri Kecil dan Menengah yang telah Terbukti mampu Menghadapi Krisis Ekonomi. Peluang Investasi pada Industri Lokal masih terbuka luas, namun demikian Prosentase Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Kecil Menengah masih kecil dibandingkan dengan Presentasi Penyaluran Dana pada Industri Besar
- e. Penurunan Luas Lahan Terbuka Hijau/Pertanian di Kota Pematang Siantar, merupakan akibat Langsung Konsep Pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi Pembangunan Kota begitu Pesat dengan Tingginya Minat Investasi, tetapi disisi lain terjadi Penurunan Lahan Terbuka Hijau/Pertanian yang akan berakibat pada Pemanasan Global (Global Warming)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan Program dan Kegiatan yang ada pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 tidak ada perbedaan baik pada Target Capaian dan Pagu Indikatif terhadap Kebutuhan Dana pada Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar. Namun tetap menjadi Perhatian bahwa Target Capaian dan Pagu masih bias mengalami Perubahan karena Pertimbangan Prioritas Program dan Kegiatan dan Hasil Capaian pada Tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara Target Capaian, Pagu Indikatif terhadap Kebutuhan Dana yang menjadi Catatan Penting untuk diperhatikan bagi OPD.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pematang Siantar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pematang Siantar	Capaian AKIP Perangkat Daerah	B Predikat	3.300.715.472	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Pematang Siantar	Capaian AKIP Perangkat Daerah	B Predikat	3.300.715.472	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	6 Dokumen	18. 572.544	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	6 Dokumen	18. 572.544	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.462.544	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.462.544	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.110.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.110.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	23 Orang/Bulan 23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	23 Orang/Bulan 23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		JumlahOrang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		JumlahOrang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum.	100 Persen	411.192.080	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum.	100 Persen	411.192.080	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan.	1 Paket	50.255.772	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan.	1 Paket	50.255.772	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga Yang	1 Paket	28.795.648	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga Yang	1 Paket	28.795.648	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	30.396.960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	30.396.960	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	52.546.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	52.546.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	249.197.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	249.197.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	78.550.480	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	78.550.480	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5 Unit	7.575.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5 Unit	7.575.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	60.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	60.600.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	30 Unit	10.375.480	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	30 Unit	10.375.480	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 laporan	253.273.418	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 laporan	253.273.418	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3.179.682	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3.179.682	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Surat Menyurat					Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	52.405.426	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	52.405.426	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	197.688.310	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	197.688.310	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	127.886.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	127.886.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	55.267.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	55.267.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.119.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.119.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	33 Unit	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	33 Unit	50.500.000	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	18,75/750 Rasio/Orang	304.010.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	18,75/750 Rasio/Orang	304.010.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kebangsaan per 100.000 Penduduk					Kebangsaan per 100.000 Penduduk			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.		Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	18,75/750 Rasio/Orang 85 Persen	304.010.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	18,75/750 Rasio/Orang 85 Persen	304.010.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	1 Dokumen	5.500.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	620 Orang	252.957.873	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	620 Orang	252.957.873	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	210 Orang	20.200.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	210 Orang	20.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.					Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.			
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	100 Keluarga	25.352.127	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	100 Keluarga	25.352.127	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik	80 Persen	20.853.972.857	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik	80 Persen	20.853.972.857	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	80 Persen	20.853.972.857	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	80 Persen	20.853.972.857	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		JUmlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		JUmlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.	1 Dokumen	5.500.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	90.200 Orang	87.228.100	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	90.200 Orang	87.228.100	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi	10 Orang	859.632.470	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan	10 Orang	859.632.470	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.			Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peeningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	11 Laporan	19.901.612.287	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peeningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	11 Laporan	19.901.612.287	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.	85 Persen	41.410.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.	85 Persen	41.410.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Ormas.	85 Persen	41.410.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Ormas.	85 Persen	41.410.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	1 Dokumen	5.500.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	100 Orang	25.810.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	100 Orang	25.810.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	72 Laporan	10.100.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	72 Laporan	10.100.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penanganan Konflik SARA	85 Persen	280.008.646	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penanganan Konflik SARA	85 Persen	280.008.646	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial		FKUB Aktif	85 Persen	280.008.646	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi ,		FKUB Aktif	85 Persen	280.008.646	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Budaya					Sosial dan Budaya					
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosil, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun .	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosil, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Dokumen	5.500.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1.080 Orang	249.175.983	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1.080 Orang	249.175.983	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, Fasilitasi	60 Orang	19.832.663	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, Fasilitasi	60 Orang	19.832.663	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Social, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	4 Laporan	5.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Social, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	4 Laporan	5.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani.	75 Persen	263.585.981	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani.	75 Persen	263.585.981	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.		Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.	75 Persen	263.585.981	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.	75 Persen	263.585.981	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,	1 Dokumen	5.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	35 Orang	75.750.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	35 Orang	75.750.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	110 Orang	182.335.981	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	110 Orang	182.335.981	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.					Penanganan Konflik di Daerah.			
JUMLAH					25.043.702.956					25.043.702.956	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Beberapa Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Para Pemangku Kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat yang terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, OKP, serta Partai Politik se-Kota Pematangsiantar yang Langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan Hasil Pengumpulan Informasi Masyarakat dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi Bahan Pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam Merumuskan Program dan Kegiatan untuk Tahun Rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan Prioritas Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian Target, Penanggulangan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas Hidup.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pematangsiantar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pematang Siantar	Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000 Penduduk.		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.		Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	0	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	0	
2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya		Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi		

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Ormas.		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	0	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penanganan Konflik SARA		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya		FKUB Aktif		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Pematang Siantar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun.	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani.		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	0	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
 - d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Mengentaskan kemiskinan;
 - g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunankebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan
 - b. ketahanan budaya;
 - c. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam
 - d. pembangunan;
 - e. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - f. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan
 - g. membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - h. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
 - i. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,
 - j. inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;

- d. Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tema RKP Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023. **Pertama**, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah ingin pada 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen. Artinya pada 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5-3 juta penduduk. **Kedua**, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. **Ketiga**, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. **Keempat**, mendorong pemulihan dunia usaha. **Kelima**, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. **Keenam**, ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan

sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas.
Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
2. Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.
Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperate governance.
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional
4. Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar

sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematangsiantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

6. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pematang Siantar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke -1 yaitu Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Pada Misi RPJMD Kota Pematang Siantar yang ke-1 ini ditetapkan tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Untuk tujuan ini terdapat 3 sasaran yaitu : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, 3. Meningkatnya kehidupan

harmonis masyarakat.

Dari ketiga sasaran pada misi ke-1 RPJMD Kota Pematang Siantar di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelaraskan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi Kota Pematang Siantar sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka **tujuan** dan **sasaran** pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam jangka menengah dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Pematangsiantar
Tahun 2024 (sesuai Renstra)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Renstra (2022)	Target					Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
	Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat		Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa	Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	300 orang /7,5%	700 orang /17,5 %	750 orang /18,75 %	800 orang /20 %	850 orang /21,25 %	900 orang /22,50 %	900 orang /22,50 %

3.3. Program dan Kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan KesbangPol Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah.	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Mebel. - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

			<p>Kantor atau Bangunan Lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		-PenyediaanJasaPenunjangUrusan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan

			<p>Sejarah Kebangsaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

		<p>Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</p>	<p>Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</p> <p>- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</p> <p>- Pelaksanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>
--	--	--	---

<p>4PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.</p>	<p>PENGAWASAN - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidangPemberdayaandan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meidiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
<p>5PROGRAMPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA.</p>	<p>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosil, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat

			<p>Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Social, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	- Penyusunan Program Kerja di Bidang

	<p>DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p>	<p>Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.</p>	<p>Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p>
--	--	---	--

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pematangsiantar**

Nama Perangkat Daerah : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
8	01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Pematang Siantar	B Predikat	3.300.715.472		-	3.333.722.627
8	01.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		6 Dokumen	18.572.544		-	18.758.269
8	01.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.462.544	DANA TRANSFER		7.537.169

				Daerah.					UMUM-DAU			
8	01.01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pematang Siantar	4 Laporan	11.110.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			11.221.100
8	01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		23 Orang/Bulan 23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750			-	2.435.353.158
8	01.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	JumlahOrang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23/14 Orang/Bulan	2.411.240.750	DANA TRANSFER UMUM- DAU			2.435.353.158
8	01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum.		100 Persen	411.192.080			-	415.304.002
8	01.01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan.		1 Paket	50.255.772	DANA TRANSFER UMUM- DAU			50.758.330
8	01.01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga Yang Disediakan		1 Paket	28.795.648	DANA TRANSFER UMUM- DAU			29.083.605
8	01.01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		1 Paket	30.396.960	DANA TRANSFER UMUM- DAU			30.700.930
8	01.01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan		1 Paket	52.546.400	DANA TRANSFER UMUM- DAU			53.071.864
8	01.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		144 Laporan	249.197.300	DANA TRANSFER UMUM- DAU			251.689.273
8	01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah		39 Unit	78.550.480			-	79.335.984

8	01.01	2.07	0005	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pematang Siantar	5 Unit	7.575.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			7.650.750
8	01.01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan		4 Unit	60.600.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			61.206.000
8	01.01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan		30 Unit	10.375.480	DANA TRANSFER UMUM- DAU			10.479.234
8	01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27 laporan	253.273.418			-	255.806.152
8	01.01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3 Laporan	3.179.682	DANA TRANSFER UMUM- DAU			3.211.479
8	01.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 Laporan	52.405.426	DANA TRANSFER UMUM- DAU			52.929.480
8	01.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	197.688.310	DANA TRANSFER UMUM- DAU			199.665.193
8	01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40 Unit	127.886.200			-	129.165.062
8	01.01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		6 Unit	55.267.200	DANA TRANSFER UMUM- DAU			55.819.872

				Dinas Jabatan.								
8	01.01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pematang Siantar	1 Unit	22.119.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			22.340.190
8	01.01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.		33 Unit	50.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			51.005.000
8	01.02			PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000 Penduduk.		18,75/750 Rasio/Orang	304.010.000			-	307.050.101
8	01.02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan		18,75/750 Rasio/Orang 85 Persen	304.010.000			-	307.050.101
8	01.02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.		1 Dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000
8	01.02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal		620 Orang	252.957.873	DANA TRANSFER UMUM- DAU			255.487.453

				Sejarah Kebangsaan.	Ika, dan Sejarah Kebangsaan.							
8	01.02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	Pematang Siantar	210 Orang	20.200.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			20.402.000
8	01.02	2.01	0008	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.		100 Keluarga	25.352.127	DANA TRANSFER UMUM- DAU			25.605.648
8	01.03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik		80 Persen	20.853.972.857			-	21.062.512.584
8	01.03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi.		80 Persen	20.853.972.857			-	21.062.512.584

				Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8	01.03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	JUmlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilian Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun.	Pematang Siantar	1 Dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000
8	01.03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.`		90.200 Orang	87.228.100	DANA TRANSFER UMUM- DAU			88.100.381

				Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.								
8	01.03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordnasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Pematang Siantar	10 Orang	859.632.470	DANA TRANSFER UMUM- DAU			868.228.794
8	01.03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peeningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		11 Laporan	19.901.612.287	DANA TRANSFER UMUM- DAU			20.100.628.409
8	01.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.		85 Persen	41.410.000			-	41.824.100

8	01.04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Cakupan Pembinaan Ormas.	Pematang Siantar	85 Persen	41.410.000			-	41.824.100
8	01.04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		1 Dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000
8	01.04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meidiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		100 Orang	25.810.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			26.068.100
8	01.04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.		72 Laporan	10.100.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			10.201.000
8	01.05			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Penanganan Konflik		85 Persen	280.008.646			-	282.808.732

				PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	SARA							
8	01.05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	FKUB Aktif.	Pematang Siantar	85 Persen	280.008.646			-	282.808.732
8	01.05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosil, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun .		1 Dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000
8	01.05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.		1.080 Orang	249.175.983	DANA TRANSFER UMUM- DAU			251.667.742
8	01.05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat		60 Orang	19.832.663	DANA TRANSFER UMUM- DAU			20.030.990

				Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kepercayaan di Daerah.							
8	01.05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Social, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Pematang Siantar	4 Laporan	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000
8	01.06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani.		75 Persen	263.585.981			-	266.221.842
8	01.06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini Berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD.		75 Persen	263.585.981			-	266.221.842
8	01.06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,		1 Dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU			5.555.000

				Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.						
8	01.06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pematang Siantar	35 Orang	75.750.000	DANA TRANSFER UMUM- DAU		76.507.500
8	01.06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		110 Orang	182.335.981	DANA TRANSFER UMUM- DAU		184.159.342
JUMLAH								25.043.702.956			25.294.139.986

BAB IV

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar pada Tahun 2024 mengusulkan anggaran dari Alokasi APBD Kota Pematangsiantar sebesar Rp. **25.043.702.956** yang terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan
pada Badan KesbangPol Kota Pematangsiantar Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	3.300.715.472
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	18. 572.544
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	7.462.544
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	11.110.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	2.411.240.750
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.411.240.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	411.192.080
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	50.255.772
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	28.795.648
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	30.396.960
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	52.546.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	249.197.300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	78.550.480
	Pengadaan Mebel.	7.575.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	60.600.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	10.375.480
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	253.273.418
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	3.179.682
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	52.405.426
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	197.688.310
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	127.886.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	55.267.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	22.119.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	50.500.000
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	304.010.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	304.010.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	5.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	252.957.873
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	20.200.000
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	25.352.127
3.	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	20.853.972.857
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	20.853.972.857
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	5.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	87.228.100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	859.632.470
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	19.901.612.287

	Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	41.410.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	41.410.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	5.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Meidiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	25.810.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	10.100.000
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA.	280.008.646
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya.	280.008.646
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosil, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	5.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	249.175.983
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	19.832.663
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonom, Social, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	5.500.000
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	263.585.981
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	263.585.981
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	5.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	75.750.000

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	182.335.981
JUMLAH		25.043.702.956

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar, baik dalam kerangka regulasi maupun masyarakat, keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu Program maupun Kegiatan antar Program, dalam satu Instansi dan antar Instansi, dengan tetap memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Agar terlaksana keterpaduan dan Sinkronisasi di dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum OPD di bawah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar tahun 2024 dalam rangka mengsinkronisasikan dan s sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber

dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP,RPJMN,RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota dan Renstra SKPD).

2. Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2021 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan Dokumen Perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat PeraturanPerundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Perlu Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan Kinerja Aparatur Perencana.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar di Tahun Anggaran 2024.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR**



**Ir. ALI AKBAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196709231993031004**